

BAB I

PENDAHULUAN

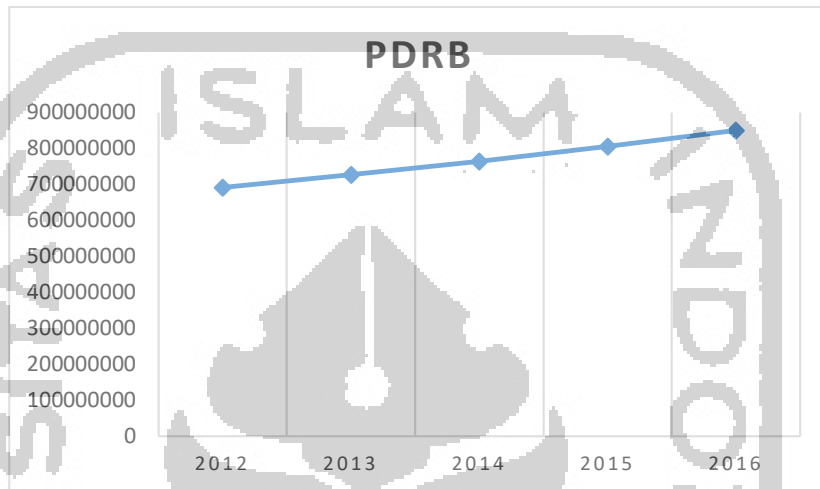
1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan sebuah proses peningkatan menjadi lebih baik yang dilakukan secara terus-menerus. Tujuan dari sebuah pembangunan merupakan menjadikan perekonomian lebih baik kemudian terwujud peningkatan kualitas/ taraf hidup serta menghasilkan masyarakat sejahtera. Indikator keberhasilan dari kegiatan pembangunan secara makro terdapat sebuah tolak ukur dari perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang tinggi mencerminkan kegiatan ekonomi yang baik di peroleh dari laju pertumbuhan PDRB atas harga konstan (Supartoyo et.al, 2013).

Perkembangan kegiatan dalam perekonomian menyebabkan pertumbuhan ekonomi dengan ditandai oleh hasil produksi terhadap barang dan jasa dari masyarakat mengalami kenaikan dengan begitu kemakmuran dapat tercapai. Pertumbuhan ekonomi merupakan kunci tujuan dari ekonomi makro hal tersebut didasari tiga alasan. Pertama, penambahan penduduk yang selalu meningkat. Kedua, perekonomian harus memenuhi banyak barang dan jasa untuk mengimbangi keinginan dan kebutuhan yang tidak terbatas. Ketiga, usaha pemerataan perekonomian (*economic stability*) melalui pembebanan pendapatan (*income redistribution*) lebih mudah jika pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Grafik 1. 1

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2012-2016



Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik).

Pada grafik 1.1, dapat kita lihat peningkatan pertumbuhan ekonomi dari PDRB atas harga konstan dan juga dari laju pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi dilihat dari PDRB atas harga konstan tahun 2010 setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan, seperti pada tahun 2012 mencapai Rp. 690.461.017,1 peningkatan terus terjadi hingga tahun 2016 dengan menghasilkan Rp. 849.077.579,9. Berbeda kasusnya dengan laju pertumbuhan ekonomi yang terjadi justru mengalami fluktuasi dari yang tertinggi pada tahun mencapai 5,47%, namun laju pertumbuhan terendah terjadi pada tahun yang hanya mencapai 5,11%.

Peningkatan produktivitas dari segala segi diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan pembentukan sumber data manusia berkualitas,

peningkatan pembangunan sektor industri secara signifikan diperlukan sehingga menjadi penggerak ekonomi utama dengan sektor industri efisien, memiliki daya saing, struktur terhadap industri yang kukuh menghasilkan produksi yang berkembang. Kegiatan pembangunan diharapkan juga terjadinya pertumbuhan maka pemenuhan sarana dan prasarana diperlukan, untuk mencapai tujuan tersebut disini peran investasi hadir sebagai faktor yang sangat penting karena fungsinya sebagai pendorong pembangunan dan pertumbuhan. Pendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dengan investasi yang tepat dalam rangka memberhasilkan pemerataan ekonomi dan stabilitas sehingga kemakmuran rakyat dicapai.

Percepatan terhadap pertumbuhan dan pembangunan terdapat beberapa kebijakan (Sukirno, 2004):

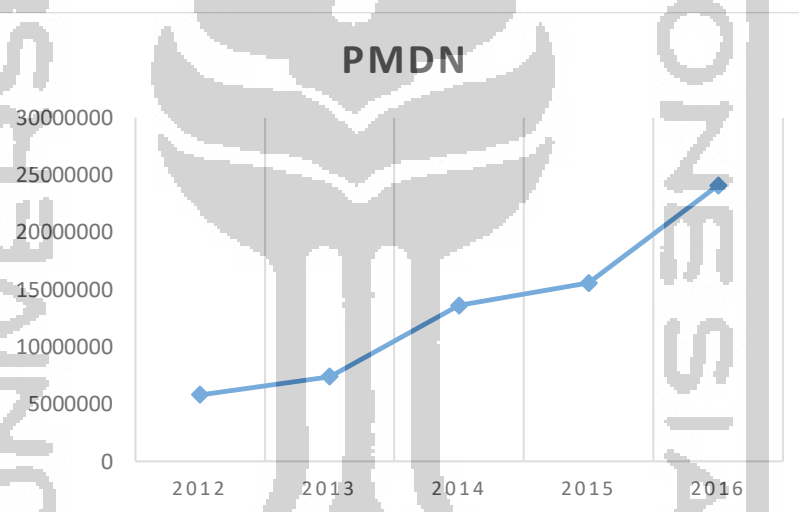
1. Kebijakan terhadap keanekaragaman kegiatan ekonomi merupakan sebuah aktivitas transisi dari perekonomian yang bersifat tradisional menjadi perekonomian modern.
2. Peningkatan infrastruktur, karena perekonomian yang modern perlu didukung oleh infrastruktur yang memadai.
3. Perubahan terhadap kualitas pendidikan memperkuat kualitas tenaga kerja untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
4. Membentuk institusi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Pembentukan modal melalui alur investasi melibatkan peran swasta dalam perekonomian yang berasal dari dalam negeri. Harrod-Domar mengemukakan bahwa

investasi-investasi diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi sebagai stok modal seperti halnya Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) semakin banyak tabungan yang kemudian diinvestasikan percepatan pertumbuhan ekonomi dapat terjadi. Secara riil terjadinya pertumbuhan setiap tabungan dan investasi yang dilakukan bergantung pada produktivitas investasi tersebut (Todaro, 2000).

Grafik 1. 2

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016



Sumber: NSWI (National Single Window for Investment).

Pada grafik 1.2, merupakan bentuk total dari seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah penanaman modal dalam negeri (PMDN). Penanaman modal dalam negeri (PMDN) mengalami kenaikan dari tahun 2012 senilai Rp. 5.797.108,5 dari total seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah serta mencapai penanaman modal yang tertinggi pada tahun 2016 mencapai Rp. 24.070.352,6. Perlu diingat bahwa investasi

baik asing maupun dalam negeri tersebut merupakan akumulasi secara keseluruhan namun pada dasarnya setiap kabupaten/kota memiliki fluktuasi yang cukup timpang.

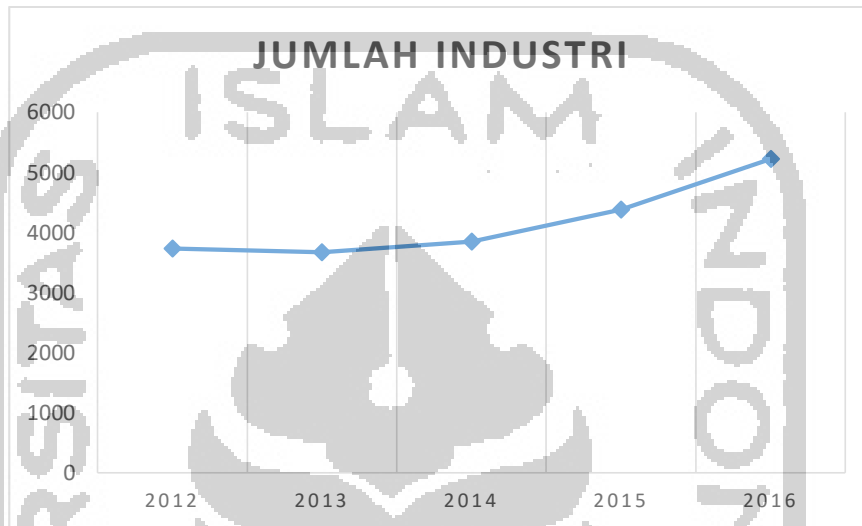
Komponen pendukung yang berpengaruh terhadap produk domestik regional bruto adalah industri. Hadirnya industri merupakan menjadi solusi dalam mendukung perbaikan atau kenaikan terhadap perekonomian daerah. Munculnya industri dapat menimbulkan *effect multidimensional* diantaranya memicu investasi atau penanaman modal dalam suatu daerah karena terdapat proyek yang dikerjakan efek selanjutnya dapat mendorong lapangan pekerjaan sehingga dapat menyerap tenaga kerja serta dapat merangasang perkembangan kegiatan ekonomi.

Pada grafik 1.3, merupakan bentuk total dari jumlah industri seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Jumlah industri mengalami kenaikan diawali pada tahun 2012 sebanyak 3736 industri dari total seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah serta kenaikan jumlah industri terus terjadi hingga tahun 2016 mencapai 5225 industri.

Peningkatan kehadiran dari jumlah industri memiliki kontribusi terhadap jalannya sebuah perekonomian. Hal tersebut dapat didukung oleh semakin bertumbuhnya industri menandakan bahwa dapat memicu berjalannya mobilitas barang dan jasa serta tidak lupa mobilitas tenaga kerja. Perkembangan industri memiliki kebiasaan untuk berkembang di Kota besar maka dapat menarik para pekerja ke Kota besar, maka perlu diubahnya *mind set* tersebut agar industri dapat berkembang di Kota-Kota secara merata supaya tenaga kerja terserap dapat merata.

Grafik 1.3

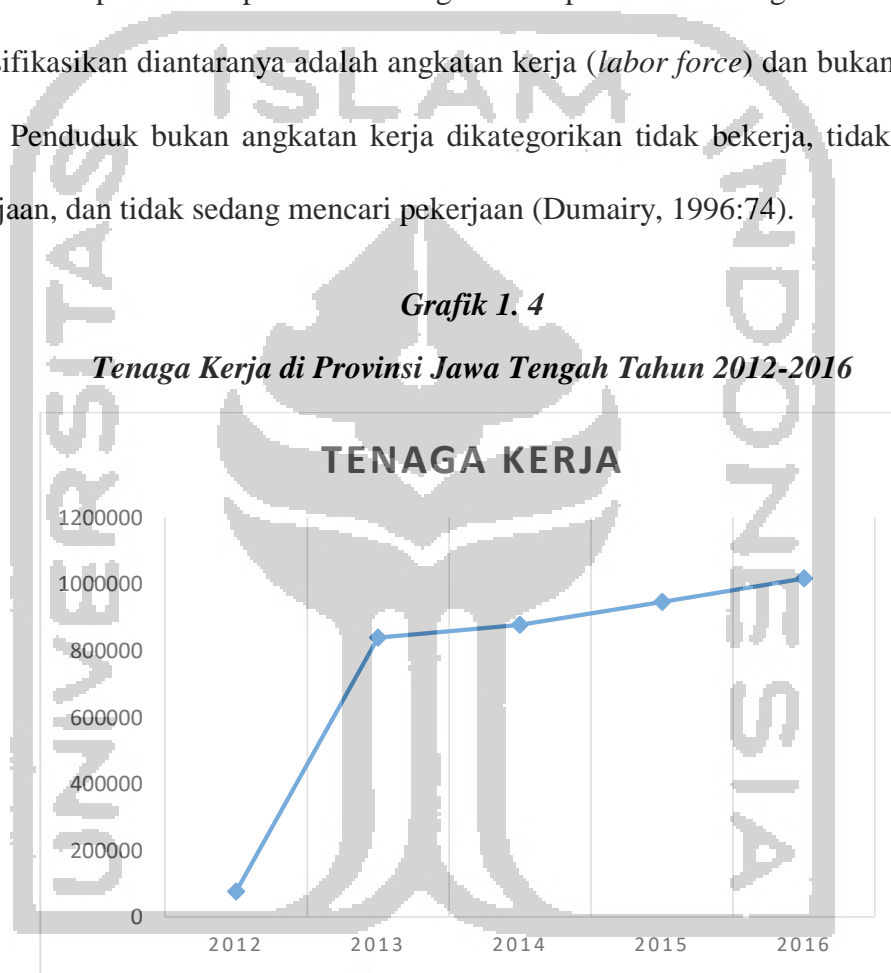
Jumlah Industri Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016



Sumber: *Jawa Tengah Dalam Angka, Berbagai edisi.*

Teori pertumbuhan ekonomi neo-klasik mengemukakan bahwa faktor produksi yaitu modal, tenaga kerja, dan teknologi (Sukirno, 1994). Hubungan antara tenaga kerja dan perekonomian sangat erat karena merupakan salah satu ukuran pertumbuhan aktivitas produksi dalam menghasilkan barang dan jasa dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melewati output yang dihasilkan terdapat campur tangan dari tenaga kerja. Banyaknya rasio modal- tenaga kerja yang terserap dalam suatu proses produksi semakin baik, semakin besar rasio modal-tenaga kerja mencerminkan pembagian modal/kapital terhadap tenaga kerja semakin besar. Sudut pandang lain berbicara bahwa terjadi sebuah kenaikan investasi atau penyediaan modal lebih terhadap tenaga kerja agar diberikan fasilitas peningkatan kualitas dari

segi pendidikan dan pengadaan pelatihan. Permintaan tenaga kerja dalam menghasilkan barang dan jasa bergantung pada situasi perusahaan, karena bergantung kepada berapa besar perusahaan ingin memproduksi. Kategori tenaga kerja diklasifikasikan diantaranya adalah angkatan kerja (*labor force*) dan bukan angkatan kerja. Penduduk bukan angkatan kerja dikategorikan tidak bekerja, tidak memiliki pekerjaan, dan tidak sedang mencari pekerjaan (Dumairy, 1996:74).



Sumber: Jawa Tengah dalam Angka, berbagai tahun penerbitan.

Pada grafik 1.4, merupakan akumulasi seluruh tenaga kerja dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Menghasilkan total tenaga kerja setiap tahunnya mengalami kenaikan dari tahun 2012 sejumlah 77087 jiwa berganti tahun 2013 menghasilkan tenaga kerja mencapai 838351 jiwa dan kenaikan terus berlanjut

sampai tahun 2016 mencapai 1016624 jiwa. Perlu diperhatikan bahwa tenaga kerja tersebut merupakan total dari seluruh kabupaten/kota namun pada realitanya tiap kabupaten/kota masih memiliki tingkat tenaga kerja yang bermacam-macam.

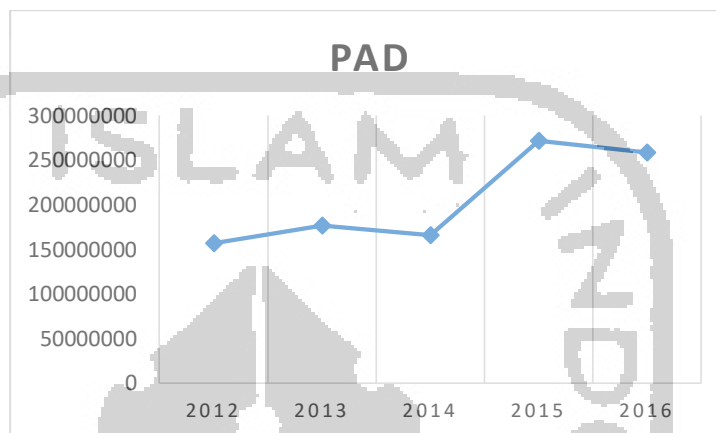
Komponen pendukung pada produk domestik regional bruto adalah bentuk kemandirian sebuah daerah dalam bentuk pendapatan asli daerah (PAD). Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada kemandirian Daerah Kabupaten dan Daerah Kota secara langsung diberikan kewenangan untuk mengembangkan wilayahnya. PAD merupakan pendapatan atau penerimaan dari sumber-sumber yang terdapat di wilayahnya komponen utama dari sebuah pendapatan asli daerah terdiri dari komponen pajak dan retribusi daerah.

Demi mendasari agar memiliki keuangan yang baik, sumber keuangan pada daerah harus cukup pula. Daerah dapat memperoleh sumber-sumber keuangan tersebut dalam beberapa langkah, diantaranya (Josef Riwu Kaho, 1988:123-125):

1. Penghimpunan dana pajak daerah dapat dilakukan daerah dengan persetujuan pemerintah.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, baik dari pasar uang, barang, maupun pemerintah.
3. Daerah dapat ikut ambil bagian dalam pendapatan pajak sentral, misalnya beberapa persen dari pajak tersebut.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memperoleh bantuan atau subsidi dari pemerintah Kabupaten.

Grafik 1. 5

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016



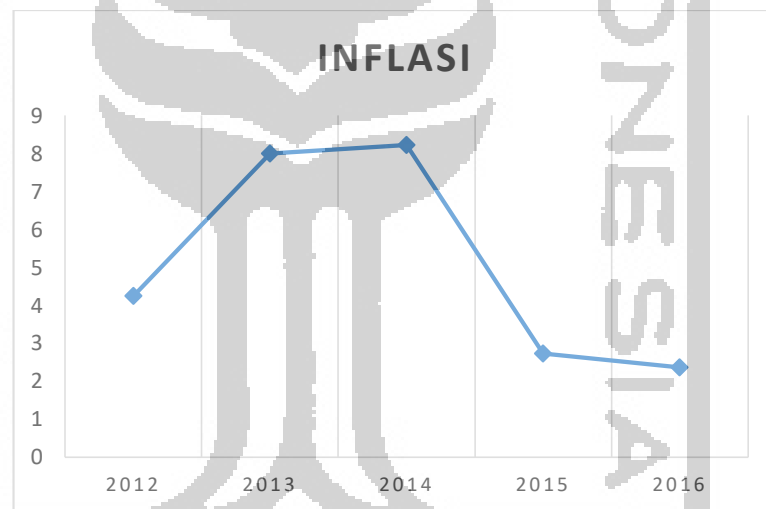
Sumber: Statistik Keuangan Pemertintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah.

Pada grafik 1.5, merupakan akumulasi dari seluruh pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Menghasilkan total terhadap pendapatan asli daerah (PAD) mengalami kenaikan dari tahun 2012 senilai Rp. 4.867.560.144, dan diikuti tahun 2013 mengalami kenaikan senilai Rp. 6.084.110.820 namun terjadi penurunan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016 senilai Rp. 9.178.545.564. Penurunan terhadap penerimaan daerah tersebut bisa saja terjadi dikarenakan oleh daerah kurang memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia atau sumber penerimaan lain seperti pajak dan retribusi mengalami penurunan.

Keadaan lain yang berpengaruh terhadap produk domestik regional bruto yaitu inflasi. Inflasi merupakan sebuah paradoks dalam perekonomian, karena jika pada

suatu perekonomian inflasi rendah maka menandakan bahwa sirkulasi atau berjalannya ekonomi sedang lesu namun jika inflasi dipantau sedang tinggi dibalik itu terdapat perekonomian yang produktif. Inflasi merupakan kenaikan harga-harga secara baik barang dan jasa secara umum dan berlangsung secara terus-menerus jika tidak ditindak lanjuti maka inflasi dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat karena beberapa golongan masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhannya.

Grafik 1. 6
Inflasi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016



Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik) Jawa Tengah.

Pada grafik 1.6, merupakan akumulasi dari seluruh inflasi di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Menghasilkan total terhadap inflasi mengalami penurunan dari tahun 2012 mencapai 4,24%, dan diikuti tahun 2013 mulai mengalami kenaikan cukup signifikan yakni mencapai 7,99% mencapai kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2014 mencapai 8,22%, secara berangsur-angsur terjadi penurunan terhadap inflasi

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015 menjadi 2.73% dan pada tahun 2016 menjadi 2.36%.

Berdasarkan pada kondisi perekonomian di Provinsi Jawa Tengah dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi, atas hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah dengan mengambil judul “**Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah Tahun 2012-2016**”.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah?
2. Bagaimana pengaruh industrialisasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten/kota di Jawa Tengah?
3. Bagaimana pengaruh banyaknya tenaga kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah?
4. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah?
5. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menemukan pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

2. Menemukan pengaruh industrialisasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten/kota di Jawa Tengah?
3. Menemukan pengaruh banyaknya tenaga kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah?
4. Menemukan pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah?
5. Menemukan pengaruh inflasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Penelitian dilakukan untuk menambah wawasan terhadap hubungan antara penanaman modal dalam negeri, industrialisasi, banyaknya tenaga kerja, Produk Asli Daerah (PAD) dan inflasi terhadap produk domestik regional bruto.
2. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam melakukan pembangunan di Kabupaten/Kota di Jawa tengah.
3. Bagi peneliti berikutnya, dapat menjadi acuan atau referensi dalam penyusunan penelitian yang berhubungan dengan pertumbuhan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.